

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pergerakan sosial, terutama dalam memperjuangkan kemerdekaan. Organisasi keagamaan yang terlibat seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga memainkan peran besar dalam mengawal faham Islam moderat dan setia pada Pancasila. Selain itu, kondisi geografis Indonesia juga terdiri dari ribuan pulau dengan keragaman bahasa, budaya, dan agama, turut melahirkan dinamika sosial budaya yang mempengaruhi ranah politik.¹

Dinamika afiliasi politik adalah fenomena kompleks yang melibatkan berbagai faktor untuk mempengaruhi bagaimana individu dan kelompok membentuk dan mengubah loyalitas politik mereka. Di Indonesia sendiri dinamika ini sangat dipengaruhi oleh sejarah Panjang pergerakan sosial, kondisi geografis yang beragam, dan kompleksitas masyarakat.²

Keragaman masyarakat Indonesia tentunya memerlukan waktu untuk membangun kohesi dalam berbangsa dan bernegara. Sejak kemerdekaannya, Indonesia terus mencari model yang tepat dalam bernegara dan berpemerintahan, sehingga masyarakat belum sepenuhnya menghargai jasa-jasa “Bapak Bangsa”. Sistem politik dan pemerintahan pasca- Presiden Soeharto yang menekankan pada kebebasan berekspresi, pembatasan jabatan presiden, dan desentralisasi, belum sepenuhnya didukung oleh penegakkan hukum dan kultur politik yang memadai. Akibatnya, apatisme dan kekecewaan terhadap partai politik dan politik semakin meningkat.³

Afiliasi politik dapat bersifat defensif, yaitu untuk membela diri dari serangan luar, atau ofensif, yaitu untuk menyerang atau mempengaruhi pihak lain. Perubahan afiliasi politik juga dapat dipengaruhi oleh kontestasi politik

¹ Bahtiar Efendy, *Islam Dan Negara: Transformasi Gagasan Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia* (Jakarta: Democracy Project, 2011).h. 125-130.

² Zudi Setiawan, *Nasionalisme NU* (Semarang: CV Aneka Ilmu, 2007).h. 55-60

³ Uinjkt.ac.id, “Dinamika Politik Indonesia”, uinjkt.ac.id, 2013, <https://www.uinjkt.ac.id/id/dinamika-politik-indonesia/>

dan kepentingan organisasi masyarakat sipil. Konflik internal partai politik seringkali disebabkan oleh adanya faksi-faksi dengan kepentingan yang berbeda. Faktor internal seperti nilai dan ideologi, kompleksitas sosiologis, struktur organisasi partai, dan pola kepemimpinan elite partai, serta faktor eksternal seperti sistem politik kepartaian dan pemilu, koalisi, kepentingan pengusaha, dan regulasi penyelesaian konflik, dapat mempengaruhi faksionalisasi.⁴

Demokrasi dinilai sebagai suatu tipe atau cara ideal untuk menggunakan sebuah sistem politik. Menurut Schumpeter dalam karya besarnya *Capitalism, socialism, and democracy*. Demokrasi adalah sebuah sistem persaingan yang terbuka dan *fair* dikalangan elite politik untuk mendapatkan kekuasaan atau jabatan. Rakyat merupakan hakim atau penentu terakhir yang memutuskan siapa yang akan memerintah atau mewakili mereka. Dengan demikian, para elite politik yang bersaing tersebut memainkan sebuah permainan politik, pola hubungan diantara rakyat dan elite politik tersebut diteguhkan melalui mekanisme pemilu yang jujur, adil dan terbuka.⁵

Robert Dahl sendiri lebih memilih menggunakan kata '*polyarchy*' daripada demokrasi. Robert Dahl menggunakan kata tersebut untuk merujuk sistem pemerintahan yang memenuhi tiga kondisi, yaitu; kompetisi yang luas diantara individu-individu dan kelompok-kelompok seperti partai politik, partisipasi politik untuk memilih pemimpin dan kebijakan, dan tingkat kebebasan sipil dan politik.⁶ Dari definisi yang dikemukakan oleh dua tokoh tersebut yaitu Schumpeter dan Robert Dahl, adalah yang dimana demokrasi mempunyai dua dimensi yaitu persaingan dan partisipasi yang dinilai oleh kedua tokoh tersebut sebagai suatu bagian penting dalam demokrasi. Hal ini bermakna dengan adanya pengaturan institusional dalam proses politik yang dimana pihak-pihak yang ingin memperoleh jabatan atau kekuasaan harus memperolehnya melalui

⁴ H Kaase, Max Barnes, S, *Political Action Mass Participation in Five Western Democracies* (London: Sage Publications, 1979).h. 20–25.

⁵ Rizal Mallarangeng, *Dari Langit: Kumpulan Esai Tentang Manusia, Masyarakat, Dan Kekuasaan*, 2008.h. 55

⁶ Siti Zuhro, *Demokrasi Lokal: Perubahan Dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal Di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Dan Bali*, 2009.h. 16.

perjuangan dan secara kompetitif untuk memenangkan suara masyarakat melalui yang namanya pemilihan umum.⁷

Arena kontestasi untuk memilih wakil rakyat yang jumlahnya sangat terbatas, dan berbanding sangat terbalik dengan banyaknya peserta pemilihan umum. Partai politik dan perseorangan sebagai peserta pemilu akan berusaha menghalalkan berbagai cara atau strategi untuk mendapatkan suara. Salah satunya dengan cara melakukan serangkaian agenda politik untuk menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan politik atau elemen masyarakat agar dapat memberikan dukungannya dalam pemilihan umum. Hal tersebut dilakukan karena karakteristik di dalam kompetisi politik menyebabkan kompetisi menjadi lebih seru dan menantang dan pada akhirnya yaitu ada pihak yang menang dan mendapatkan kursi atau jabatan dan kekuasaan serta ada juga pihak yang kalah yang kemudian harus berada di luar jabatan atau kekuasaan tersebut.⁸

Kekuatan politik yang keberadaannya sangat diperhitungkan atau banyak diincar oleh para peserta pemilihan umum untuk meraup banyak suara adalah Organisasi Masyarakat Sipil. Kekuatan organisasi ini terletak pada jumlah massa yang lumayan banyak hingga akar rumputnya. Maka tidak heran apabila kemudian peserta pemilihan umum menggunakan strategi untuk mendekati organisasi masyarakat sipil dengan menjalin Kerjasama dalam bidang politik. Hal ini yang akhirnya menyeret organisasi masyarakat sipil ikut terlibat dalam hal berpolitik untuk mendukung calon tertentu yang telah bersepakat dengan mereka dalam pemilihan umum agar supaya bisa memobilisasi dan mengamankan suara dari massa yang dimiliki oleh organisasi tersebut.⁹

Salah satu organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam kontestasi politik atau pemilihan umum adalah Organisasi Nahdlatul Ulama, yang dimana organisasi ini adalah organisasi berbasis agama terbesar di Indonesia. Maka

⁷ Zuhro.h. 16.

⁸ Zebrenika.h. 2-3.

⁹ Zebrenika.h. 3.

tidak heran, peserta pemilu sering menyeret atau melibatkan organisasi yang satu ini.¹⁰

Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) adalah suatu organisasi yang sudah menjadi hal yang tidak asing ditelinga masyarakat, terutama dalam Masyarakat tradisional seperti kiai, ulama dan santri. Sebagai salah satu organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama sudah berkiprah lebih dari 1 Abad dari tanggal kelahirannya 31 Januari 1926. Hal ini memperlihatkan bahwa organisasi Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang sudah cukup lama dan matang dalam hal Sejarah. Secara historis organisasi Nahdlatul Ulama tampil sebagai antitesa dari keresahan Masyarakat Islam tradisional di era tersebut.¹¹

Selain didirikan sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama juga banyak terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan melalui nilai semangat juang para kiai dan santri-santrinya, karena itulah Nahdlatul Ulama menjadi salah satu faktor penting dalam melawan penjajah kolonial. atas semangat juangnya melawan penjajah pada masa itu.¹² Kaum Nahdhiyin, sebagai anggota dan pengikut Nahdlatul Ulama, merupakan kelompok sosial keagamaan terbesar di Indonesia dengan basis massa yang kuat dan pengaruh signifikan dalam politik nasional.¹³

Pada masa Pemerintahan Soekarno, wakil Presiden Indonesia Moh. Hatta pada saat itu menandatangani Maklumat No. X tanggal 3 November 1945 yang menjelaskan pemberian kesempatan kepada Masyarakat untuk mendirikan partai agar dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran yang ada dalam Masyarakat.¹⁴

Organisasi Nahdlatul Ulama memiliki hubungan yang panjang dengan kegiatan politik di Indonesia seiring dengan dinamika zaman. Keterlibatan Nahdlatul Ulama secara intens dengan perpolitikan di Indonesia dimulai ketika

¹⁰ Setiawan, *Nasionalisme NU*.h. 25.

¹¹ Setiawan.h. 22.

¹² Setiawan.h. 50–55.

¹³ Nur Khalik Ridwan, *Nu & Bangsa 1914 - 2010: Pergulatan Politik & Kekuasaan* (Yogyakarta, 2014).h. 10–12.

¹⁴ Deliar Noer, *Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa* (Bandung, 2001).h. 135.

Nahdlatul Ulama bergabung dalam Partai Masyumi yang waktu itu menjadi wadah seluruh umat Islam di Indonesia.¹⁵

Keputusan bergabungnya Nahdlatul Ulama di Masyumi menjadi awal Sejarah Nahdlatul Ulama masuk dalam politik praktis. Bergabungnya Nahdlatul Ulama ke Masyumi juga tidak bertahan lama dikarenakan ada beberapa alasan yang dimana salah satunya adalah hak pembagian kekuasaan yang kurang sesuai.¹⁶

Sekalipun organisasi ini memiliki pengikut yang besar, dengan adanya anggota-anggota Nahdlatul Ulama dan representasi suara Nahdlatul Ulama yang sangat besar, tetapi tetap diperlakukan dengan tidak adil dan tidak berkorelasi dengan posisi-posisi politik strategis yang seharusnya diperoleh partai tersebut. Akibat dari kekecewaan tersebut pada tanggal 3 Juli 1952 setelah pergantian 14 kabinet, Nahdlatul Ulama memutuskan untuk keluar dari Masyumi dan membuat partai Baru yaitu Partai NU.¹⁷

Sebagai bentuk ketidakpuasan dari partai sebelumnya yaitu Masyumi, Nahdlatul Ulama kemudian memutuskan untuk menjadi partai politik pada tahun 1952. Keputusan tersebut menjadi kejutan dalam pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 ketika partai Nahdlatul Ulama langsung menduduki posisi ketiga tertinggi dalam perolehan suara di atas Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berada di posisi keempat. Dengan demikian, Nahdlatul Ulama secara resmi menjadi partai politik pada tahun tersebut. Keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam berpolitik pun semakin dalam dan luas.¹⁸

Dalam panggung politik, organisasi Nahdlatul Ulama dengan berbagai macam pengalaman dan Sejarah hanya berlangsung hingga pada masa Orde Baru. Pada masa Orde baru, Nahdlatul Ulama mulai merasa posisinya mulai tidak relevan lagi dalam partai politik. Oleh karena itu, pada tahun 1979 bertepatan dengan Mukhtamar Nahdlatul Ulama di Semarang, muncul sebuah

¹⁵ Setiawan, *Nasionalisme NU*.h. 62.

¹⁶ Ridwan, *Nu & Bangsa 1914 - 2010: Pergulatan Politik & Kekuasaan*.h. 53.

¹⁷ Ridwan.h. 62-65.

¹⁸ Setiawan, *Nasionalisme NU*.h. 63.

gagasan bahwa supaya Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah 1926.¹⁹ Pada era ini Nahdlatul Ulama masih bertahan dalam partai politik melalui fusi partai Islam yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Karena masih berperan dalam ranah politik, Nahdlatul Ulama juga enggan untuk meninggalkan keterlibatannya dalam partai politik.²⁰

Pada saat Orde Lama runtuh, keadaan zaman pun ikut berubah. Rezim Orde baru melakukan penyederhanaan partai melalui fusi yang memaksa penggabungan partai Nahdlatul Ulama ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pemerintah yang pada saat itu ingin mengamankan suara partai Golkar kemudian melakukan berbagai rekayasa dan upaya dengan cara menempatkan ketua umum PPP Djaelani Naro yang dimana kebijakannya sangat merugikan Nahdlatul Ulama yang bersikap kritis terhadap pemerintah pada saat itu. PPP memposisikan caleg yang berasal dari Nahdlatul Ulama di nomor urutan yang paling bawah yang tidak mungkin terpilih sebagai anggota legislatif. Sistem keterpilihan dalam DPR yang digunakan pada waktu itu masih berdasarkan nomor urut.²¹

Keresahan para ulama yang merasa keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam partai politik menyebabkan tugas-tugas sosial keagamaan di Nahdlatul Ulama menjadi terbengkalai dan ditambah dengan kekecewaan terhadap PPP yang menjadi alasan kembalinya Nahdlatul Ulama sebagai organisasi massa Islam yang diputuskan dalam Khittah 1926 pada Muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo Jawa Timur.²²

Keputusan kembalinya Nahdlatul Ulama ke Khittah 1926 serta penegasan bahwa organisasi Nahdlatul Ulama berada pada suatu garis politik netral yang ditetapkan dalam Muktamar Nahdlatul Ulama di Situbondo pada tahun 1984. Dalam upaya menunjukkan keseriusannya mundur dari panggung politik,

¹⁹ Ridwan, *Nu & Bangsa 1914 - 2010: Pergulatan Politik & Kekuasaan*.h. 241.

²⁰ Marijan Kacung, *Quo Vadis NU Setelah Kembali Ke Khittah 1926* (Jakarta: Erlangga, 1992).h. 105.

²¹ Ridwan, *Nu & Bangsa 1914 - 2010: Pergulatan Politik & Kekuasaan*.h. 83–85.

²² Ridwan.h. 92.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) direkomendasikan untuk mengeluarkan aturan untuk melarang rangkap jabatan semua pengurus.²³

Setelah Khittah Nahdlatul Ulama ditetapkan, seharusnya Nahdlatul Ulama tidak terlibat lagi dalam dunia politik. Namun kebiasaan orang-orang Nahdlatul Ulama bermain dalam politik berakibat pada generasi selanjutnya. Kemunculan organisasi Nahdlatul Ulama dalam panggung politik setelah ditetapkannya Khittah 1926 mulai terlihat pada awal Era Reformasi yang diyakini sebagai salah satu strategi Nahdlatul Ulama dalam mempertahankan organisasi. Langkah ini juga yang menjadi awal kembalinya Nahdlatul Ulama ikut serta dalam praktik politik.²⁴

Reformasi pada tahun 1998 memunculkan kesempatan bagi Nahdlatul Ulama untuk mendirikan partai baru. Organisasi Nahdlatul Ulama kemudian membentuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai wadah aspirasi politik bagi warga Nahdlatul Ulama, Sementara organisasi Nahdlatul Ulama tetap berjalan sebagai ormas Islam yang mengurus warganya dari bidang dakwah dan sosial keagamaan. Pada masa ini pula yang mengantarkan ketua umum PBNU KH.Abdurrahman Wahid pada saat itu menjadi presiden republik Indonesia, jabatan politik tertinggi di Indonesia yang banyak diidam-idamkan oleh para politisi.²⁵

Potensi suara Nahdlatul Ulama yang besar ini juga kemudian mendorong partai politik untuk menggandeng para tokoh Nahdlatul Ulama dalam berpolitik. Ketua Umum PBNU KH.Hasyim Muzadi menjadi cawapresnya Megawati sementara disisi lain KH.Salahuddin Wahid menjadi cawapresnya Wiranto dalam pilpres 2004. Walaupun dalam pemilu tersebut mereka gagal menduduki kursi kepresidenan dikarenakan kalah oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.²⁶

²³ Alaena Badrun, *N.U., Krisisme, Dan Pergeseran Makna Aswaja* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000).h. 86.

²⁴ Ridwan, *Nu & Bangsa 1914 - 2010: Pergulatan Politik & Kekuasaan*.h. 142.

²⁵ Setiawan, *Nasionalisme NU*.h. 113.

²⁶ Setiawan.h. 122.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana afiliasi politik kaum nahdiyyin sebelum pemilu 1999?
- b. Bagaimana afiliasi politik kaum nahdiyyin dalam pemilu 1999 dan 2004?

C. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui afiliasi politik kaum nahdiyyin sebelum pemilu 1999
- b. Untuk mengetahui afiliasi politik kaum nahdiyyin dalam pemilu 1999 dan 2004

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mencari referensi supaya memperkuat penelitian. Setelah menemukan sumber-sumber yang relevan langkah selanjutnya adalah komparasi atau perbandingan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu baik dari berupa buku, skripsi, dan jurnal.²⁷ Adapun kajian terdahulu yang menjadi Tinjauan Pustaka penelitian ini, yaitu:

Skripsi : *Dinamika Politik PKB (Studi Tentang Konflik Internal 1999-2004)*

Oleh Ummy Kulsum Universitas Jember Fakultas Sastra Pada Tahun 2013. Skripsi ini membahas mengenai konflik yang terjadi pada internal PKB yang dimana akar permasalahan ini salah satu faktornya karena kepentingan politik yaitu poros tengah yang menginginkan GusDur sebagai Presiden RI yang mendapat tanggapan Pro dan kontra pada tubuh PKB. Hal ini menyebabkan perpecahan internal PKB sehingga menjadi dua kubu, yaitu kubu PKB Kuningan dan PKB Batu Tulis. Adapun konflik ini menjadi konflik yang berkepanjangan dan menjadi dampak kemerosotan suara PKB pada Pemilu 2004. Skripsi ini hanya fokus mengenai internal Partai PKB saja. Sementara penulis membahas mengenai konflik yang terjadi antara PKB dan PPP yang menjadi ajang perebutan massa kaum Nahdiyyin, pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004.

²⁷ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).h. 50-55.

Skripsi : *Peran Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Mendukung Kesuksesan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pada Pemilu 1999 Di Kabupaten Klaten* Oleh Siti Khomsatun Universitas Sebelas Maret Fakultas Sastra dan Seni Rupa 2010. Penelitian ini mengangkat mengenai kontribusi penting NU dalam membantu PKB selama Pemilu 1999. Beberapa elemen yang berkontribusi adalah keberadaan figur-figur NU, penggerakan massa, serta teknik kampanye yang berhasil. Fokus utama skripsi ini terbatas pada penggerakan dan partisipasi NU dalam peningkatan suara PKB di Kabupaten Klaten pada pemilu 1999. Sementara itu, penulis juga membahas lingkup yang lebih luas terkait Peran NU di dalam partai politik PPP dan PKB, yang mencakup mobilisasi di Pemilu 1999 dan Pemilu 2004.

Jurnal : *Analisis Pergeseran Pandangan Politik Massa Dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pada Tahun 1999 di Sampang* Oleh Mustofa Dalam Education and Human Development Journal (EHDJ) 1 (1), 40-50, Tahun 2016. Tulisan ini mengulas perubahan politik lokal yang dipicu oleh rasa ketidakpuasan terhadap partai lama PPP sebagai representasi Orde Baru, kedekatan budaya dengan organisasi keagamaan, dan peran penting tokoh agama dalam mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Ini menunjukkan betapa krusialnya faktor budaya keagamaan dalam membentuk situasi politik di daerah tertentu. Jurnal ini membatasi pembahasannya pada pergeseran pilihan dalam pemilu tahun 1999 di Sampang, sedangkan penulis membahas Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 dengan lingkup yang lebih luas.

E. Metode Penelitian

Penelitian sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis rekam jejak peninggalan zaman dahulu. Dengan menggunakan metode sejarah, sejarawan berusaha untuk merekonstruksi jejak-jejak peninggalan masa lampau secara imajinatif.²⁸ Menurut Kuntowijoyo dalam bukunya, penelitian sejarah merupakan penelaahan sumber-sumber dengan cara mengumpulkan sumber, kritik, interpretasi, dan historiografi dengan diawali pemilihan topik terlebih dahulu.²⁹

Kata metode berasal dari Bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan, dalam kaidah ilmiah metode berkaitan dengan cara kerja atau prosedur untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.³⁰

1. Heuristik

Heuristik merupakan tahapan awal dari penulisan sejarah yang artinya mencari sumber yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti. Dalam kaitannya dengan penelitian sejarah, tentunya sumber sejarah itu berupa catatan, saksi mata, dan yang lainnya yang dapat merekonstruksikan gambaran sesuatu peristiwa sejarah.³¹

Menurut Notosusanto heuristic berasal dari Bahasa Yunani heuriskein, yang artinya sama dengan *to find* yang berarti tidak hanya menemukan, tetapi mencari dahulu. Pada tahapan ini kegiatan diarahkan pada penjajakan, pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber yang akan diteliti, baik berupa temuan benda ataupun sumber lisan.³²

Dalam tahapan ini penulis berusaha mengumpulkan sumber-sumber. Dalam tahapan ini terbagi menjadi dua pengelompokan sumber yaitu

²⁸ Samsuddin Helius, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2020).h. 165.

²⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2005).h. 89.

³⁰ Muhammad Saleh Madjid, abd. Rahman Hamid, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2018).h. 40.

³¹ Johan Wahyudin, Dien Madjid, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar* (Jakarta: Prenadamedia, 2014).h. 45.

³² Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*.h. 93.

sumber primer dan sumber sekunder. Berikut sumber penelitian yang penulisan dapatkan:

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan data yang paling utama dalam penelitian. Menurut Kuntowijoyo, sumber primer dapat berupa dokumen tertulis berdasarkan kurun waktu tertentu, dokumen dari Bahasa latin atau naskah, alat-alat zaman dahulu, artefak dan lain-lain.³³ Adapun sumber primer yang penulis dapatkan yaitu:

Tulisan

- 1) Hasil Rekapitulasi KPU Pemilu Tahun 1971 oleh Media Akun Resmi KPU
- 2) Hasil Rekapitulasi KPU Pemilu Tahun 1997 oleh Media Akun Resmi KPU
- 3) Hasil Rekapitulasi KPU Pemilu Tahun 1999 oleh Media Akun Resmi KPU
- 4) Hasil Rekapitulasi KPU Pemilu Tahun 2004 oleh Media Akun Resmi KPU
- 5) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XI/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Pemilihan Umum
- 6) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXII/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan
- 7) Koran “Bali Post” Edisi Jum’at, 4 Desember 1998, tentang PKB Tak Akan Koalisi Dengan PPP
- 8) Koran “Bali Post” Edisi Jum’at, 4 Desember 1998, tentang PPP Sulit Raih Suara Pada Pemilu 1999
- 9) Koran “Bali Post” Edisi Kamis , 30 Juni 1994, tentang NU, PPP, dan Politik “Floating Mass”

³³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*.h. 74.

- 10) Koran “Bali Post” Edisi Kamis, 30 Januari 1997, tentang Gus Dur: Sulit Memprediksi Pemilu 1997
- 11) Koran “Bali Post” Edisi Senin, 1 Maret 1999, tentang Lama Ditindas Kini Saatnya PKB Membalas
- 12) Koran “Bali Post” Edisi Senin, 28 April 1997, tentang Kontroversi (Pesan Pemilu Keluarga Besar NU)
- 13) Koran “Berita Yudha” Edisi Jum’at, 14 Desember 1984, tentang Hasil-hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama
- 14) Koran “Berita Yudha” Edisi Rabu, 12 Desember 1984, tentang Keluarnya NU dari PPP Didorong Faktor Depolitisasi Dalam NU
- 15) Koran “Berita Yudha” Edisi Selasa, 18 Desember 1984, tentang Hasil Mukhtamar Situbondo Mulai Dipertentangkan
- 16) Koran “Berita Yudha” Edisi Selasa, 31 Desember 1984, tentang NU Desak Aparat Tindak Otak dan Pelaku Kekerasan
- 17) Koran “Berita Yudha” Edisi Senin, 10 Desember 1984, tentang Amanat Presiden di Situbondo dan NU jangan Ketinggalan
- 18) Koran “Berita Yudha” Edisi Senin, 10 Desember 1984, tentang NU Tidak Terikat PPP
- 19) Koran “Cakrawala” Edisi Kamis, 10 April 1997, tentang Visi Penggembosan
- 20) Koran “Harian Abadi” Edisi Rabu, 14 Maret 1973, tentang Penyederhanaan Partai Politik
- 21) Surat Tugas PBNU Tentang Sejarah Pendirian PKB pada Tanggal 22 Juni 1998
- 22) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969, tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri
- 23) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975, tentang Partai Politik dan Golongan Karya
- 24) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002, tentang Partai Politik

b. Sumber Sekunder

Buku

- 1) Abdurahman, D. (2011). Metodologi Penelitian Sejarah Islam.
- 2) Alaena, B. (2000). NU: Krisisme dan Pergeseran Makna Aswaja.
- 3) Albani, M. A. (2021). Memahami Nahdlatul Ulama.
- 4) Azra, A. (1998). Tokoh dan Pemimpin Agama: Biografi Sosial dan Intelektual. Badan Litbang Agama Departemen Agama RI dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM).
- 5) Barnes, S. H., & Kaase, M. (1979). Political Action: Mass Participation in Five Western Democracies.
- 6) Bolan, B. J. (1985). Pergumulan Islam di Indonesia.
- 7) Choirie, A. E. (2002). PKB Politik Jalan Tengah NU Eksperimentasi Pemikiran Islam Inklusif dan Gerakan Kebangsaan Pasca Kembali Ke Khittah 1926.
- 8) Choirie, A. E. (2008). PKB Dari NU Untuk Indonesia.
- 9) Dagun, S. (1997). Kamus Besar Ilmu Pengetahuan.
- 10) Daud, S. (2021). Reorientasi Politik NU Pada Masa Orde Baru (Analisis Strategi Politik NU Tahun 1984- 1998).
- 11) Hadi, H. S. (2004). Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid) Guru Bangsa, Bapak Pluralisme.
- 12) Haidar, M. A. (2011). Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia.
- 13) Hamid, A. R., & Madjid, M. S. (2014). Pengantar Ilmu Sejarah.
- 14) Haris, S. (1991). PPP dan Politik Orde Baru.
- 15) Haris, S. (2014). Partai, Pemilu dan Parlementer Era Reformasi.
- 16) Ihsan, B. (2016). Ideologi Islam dan Partai Politik: Strategi PPP Dalam Memasukkan Nilai-Nilai Islam ke Dalam Rancangan UU di Era Reformasi.
- 17) Jayli, H., & Tohadi, M. (2003). PKB dan Pemilu 2004. Lembaga Pemenang Pemilu Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa.

- 18) Kaisiepo, M. (1999). Memilih Partai Mendambakan Presiden; Belajar Berdemokrasi di Ufuk Milenium.
- 19) Kellstedt, D. C., & Legee, L. A. (Eds.). (2006). Agama dalam politik Amerika.
- 20) Khalik, R. N. (2010). Nasionalisme NU: Pergulatan Politik dan Kekuasaan.
- 21) Kuntowijoyo. (1994). Metodologi Sejarah.
- 22) Kuntowijoyo. (2013). Pengantar Ilmu Sejarah.
- 23) Madjid, M. D., & Wahyudi, J. (2014). Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar.
- 24) Marijan, K. (1992). Quo Vadis NU: Setelah Kembali ke Khittah 1962.
- 25) Mashad, D. (2008). Akar konflik politik Islam di Indonesia.
- 26) Muhtadi, A. S. (2004). Komunikasi Politik NU: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif.
- 27) Murtopo, A. (1984). Strategi Politik Nasional.
- 28) Nahrawi, I. (2005). Moralitas Politik PKB (Aktualisasi PKB Sebagai Partai Kerja, Partai Nasional dan Partai Modern).
- 29) Noer, D. (2001). Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa.
- 30) Nuryanti, Sri. (2016). Masa Depan Partai Islam di Indonesia: Studi Tentang Volatilitas Elektoral dan Faktor Penyebabnya.
- 31) PDAT. (2025). Konflik Nahdlatul Ulama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang Tak Kunjung Reda.
- 32) Rifqi, M. (2010). Gusdur Biografi Singkat 1940-2009.
- 33) Saydam, G. (1999). Dari Bilik Suara ke Masa Depan Indonesia: Potret Konflik Politik Pasca Pemilu dan Nasib Reformasi.
- 34) Setiawan, Z. (2007). Nasionalisme NU.
- 35) Sjamsuddin, H. (2007). Metodologi Sejarah.
- 36) Sulasman. (2014). Metodologi Penelitian Sejarah.
- 37) Suryadhinata, L. (1982). Political Parties and The 1982 General Election in Indonesia.

- 38) Tajfel, H., & Turner, J. C. (2001). An Integrative Theory of Intergroup Conflict. In R. Brown & S. Gaertner (Eds.), *Intergroup Relations: Essential Readings* (pp. 238–253). Blackwell. (Karya asli diterbitkan tahun 1979).
- 39) Tebba, S. (2001). *Islam Menuju Era Reformasi*.
- 40) Wahid, A. (2023). Gus Dur & NU “Kembali Kepada Khittah 1926”.
- 41) Zuhro, S. (2009). *Demokrasi Lokal Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali*.

Skripsi

- 1) Alvia, L. (2015). *Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid (GusDur) dan Pengaruhnya Terhadap Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Setelah Era Reformasi 1998-2009*.
- 2) Aqidah, R. F. (2019). *Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pada Masa Orde Baru (Studi Historis Pemilu 1977 di Indonesia)*.
- 3) Hidayati, A. (2015). *Nahdlatul Ulama (NU) di Era Reformasi: Studi Tentang Muslimat NU Periode 2011-2014 dan Khittah NU 1926*.
- 4) Khomsatun, S. (2010). *Afiliasi politik kaum Nahdliyin dengan Partai Politik PPP dan PKB pada Pemilu 1999 dan 2004 di Kabupaten Klaten*.
- 5) Minan, A. K. (2018). *Partai Persatuan Pembangunan pasca kembalinya NU ke khittah 1926 tahun 1984-1994*.
- 6) Mulyadi, I. (2002). *Penurunan Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan Pada Pemilu 1999 di Indonesia*.
- 7) Zebrenika, T. A. (2015). *Kontestasi Politik dan Politik Afiliasi Pada Organisasi Masyarakat Sipil Studi pada Fatayat Nahdlatul Ulama Cabang Kota Surabaya, Jawa Timur dalam Pemilihan Umum 2014*.

Jurnal

- 1) Andrias, M. A. (2016). Model Kepemimpinan Politik Kyai: Studi Peran Kyai Dalam Pergeseran Perilaku Politik Massa NU PKB dan PPP. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 7 No. 2.
- 2) Ariffin, M. (2019). Sejarah Konflik Partai Persatuan Pembangunan di Masa Orde Baru. Candrasangkala: *Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, Vol. 5 No. 1.
- 3) Dhakhiri, H., & Djafar, T. M. (2015). Struktur Politik Partai Kebangkitan Bangsa. *Politik* Vol. 11 No.1.
- 4) Goncing, N. (2015). Politik Nahdatul Ulama dan Orde Baru. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Vol.1 No. 1.
- 5) Hidayatullah, A., & Haidar, M. A. (2014). Depolitisasi Nahdlatul Ulama 1968-1983. *AVATARA: E-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 2 No. 3.
- 6) Hidayatulloh, N. S., & PAMUNGKAS, Y. H. (2018). Dagelan Politik Gus Dur tahun 1999-2001. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 6 No. 3.
- 7) Jaman, D. N. (2025). Dinamika Partai Nahdlatul Ulama (NU) Pasca Pemberlakuan Kebijakan Fusi Partai Tahun 1977-1984. *King Jurnal Sejarah Indonesia* Vol. 3 No. 1.
- 8) Kadomi, M. F. (2022). Kyai dan Politik: Peranan KH Mahfudz Ridwan Dalam Partai Kebangkitan Bangsa 1998-2008: Ulema and Politics: The Role of KH Mahfudz Ridwan in the National Awakening Party 1998-2008. *Journal of Islamic History*, Vol.2 No. 1.
- 9) Mustofa, M. (2016). Analisis Pergeseran Pandangan Politik Massa dari PPP ke PKB 1999 di Sampang. *Education And Human Development Journal (EHDJ)*, Vol. 1 No. 1.
- 10) Niwandhono, P. (1967). Perjalanan Menuju Fusi Partai: Dinamika Partai Nahdlatul Ulama. *Agenda*, Vol.4 No. 9.

- 11) Nofiaturrahmah, F. (2014). Melacak Peran Kyai-Santri dalam Politik Kebangsaan di Indonesia. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. 3 No. 1
- 12) Noor, F. (2016). Leadership and Ideological Bond: PPP and Internal Fragmentation in Indonesia. *Studia Islamika*, Vol. 23 No. 1.
- 13) Rakhman, S. (2021). Dinamika Perkembangan Politik Nahdlatul Ulama Pasca Khittah Tahun 1984-1999. *Heuristik: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 1 No. 1.
- 14) Rofik, A. (2011). DINAMIKA PERILAKU PEMILIH NU; Pasang Surut Suara NU Pada Pemilu Paska Orde Baru. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 3 No. 1.
- 15) Shobacha, N. (2012). Strategi Politik Nahdlatul Ulama Di Era Orde Baru. *JRP (Jurnal Review Politik)*, Vol. 2 No. 1.

2. Kritik

Tahapan yang kedua dalam penelitian sejarah yaitu kritik. Kritik merupakan proses verifikasi sumber. Sumber-sumber yang telah didapatkan akan diuji ke autentitasan serta kredibilitas sumber yang telah dihimpun. Terdapat dua kritik sumber dalam penelitian sejarah yaitu kritik eksternal dan kritik internal.³⁴

a. Kritik Eksternal

Kritik eksternal merupakan verifikasi keabsahan sumber sejarah berkaitan dengan jenis tulisan dan kertas, bahasa, kalimat, ungkapan dan semua penampilan luarnya guna untuk mengetahui keabsahannya.³⁵

³⁴ Kuntowijoyo.h. 77.

³⁵ Kuntowijoyo.h. 77.

Sumber Tulisan

- 1) Hasil Rekapitulasi KPU Pemilu Tahun 1999 oleh Media Akun Resmi KPU. Hasil tersebut dikeluarkan langsung Oleh KPU, Adapun untuk pelaksanaan Hasil final pemilu 1999 baru diketahui masyarakat pada tanggal 26 Juli 1999 di karenakan ada beberapa faktor yang menghambat hasil Pemilu ditunda. Tulisan dari KPU juga sangat jelas karena masih bisa diakses melalui internet.
- 2) Hasil Rekapitulasi KPU Pemilu Tahun 2004 oleh Akun Resmi KPU sebenarnya tidak tercantum di Media resmi KPU. Media resmi KPU hanya mencantumkan nama-nama partai politik yang ikut serta dalam Pemilu tersebut, tetapi hasil Pemilu 2004 ini tertulis dalam akun resmi Badan Pusat Statistik.
- 3) Koran “Berita Yudha” Edisi Jum’at, 14 Desember 1984, tentang Hasil-hasil Muktamar Nahdlatul Ulama. Kondisi koran tersebut masih baik dan masih jelas untuk dibaca. Bahasa yang digunakan juga sangat difahami oleh pembaca.
- 4) Koran “Berita Yudha” Edisi Rabu, 12 Desember 1984, tentang Keluarnya NU dari PPP Didorong Faktor Depolitisasi Dalam NU. Kondisi koran cukup baik dan jelas untuk dibaca. Namun, ada beberapa noda tetapi tidak mengganggu tulisan yang ada di dalam koran tersebut.
- 5) Koran “Berita Yudha” Edisi Senin, 10 Desember 1984, tentang NU Tidak Terikat PPP. Kondisi koran cukup baik dan jelas untuk dibaca. Namun, ada beberapa noda tetapi tidak mengganggu tulisan yang ada di dalam koran tersebut termasuk kondisi yang penulis bahas.
- 6) Koran “Bali Post” Edisi Jum’at Pon, 4 Desember 1998. Hal 15, tentang PPP sulit raih suara pada pemilu 1999. Keadaan koran tersebut terlihat sedikit kotor yang terkena bercak air sehingga tidak mengganggu atau merusak tulisan dari koran tersebut dan

keadaan koran tersebut sangat baik dan jelas untuk dibaca. Kalimat dan Bahasa yang digunakan dalam koran tersebut begitu baik.

- 7) Koran “Bali Post” Edisi Senin Kliwon, 1 Maret 1999, tentang Lama ditindas kini saatnya PKB membalas. Keadaan koran masih rapi, tulisan dan Bahasa dalam koran juga masih jelas untuk dibaca. Namun keadaan koran sedikit kotor dan ada sedikit robek dibagian atas koran, tapi tidak mengganggu pada pembahasan penulis.
- 8) Surat Tugas PBNU Tentang Sejarah Pendirian PKB pada Tanggal 22 Juni 1998, surat ini ditanda tangani oleh beberapa tokoh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, salah satunya oleh H.Abdurrahman Wahid sebagai ketua umum pada waktu itu. Surat ini saya dapatkan di internet di Web DIGDAYA-Republika. Keadaan fisik berupa foto yang dikeluarkan oleh web tersebut telah usang dan sedikit kurang jelas dari segi tulisannya.
- 9) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975, tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Kondisi Undang-Undang masih bagus dan rapih serta dapat dibaca secara jelas. Bahasa yang digunakan juga cukup dapat difahami sehingga tidak menyulitkan pembaca untuk memahami kalimat- kalimat yang ada di dalam Undang- undang tersebut.
- 10) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002, tentang Partai Politik. Bahasa yang digunakan juga cukup dapat difahami sehingga tidak menyulitkan pembaca untuk memahami kalimat- kalimat yang ada di dalam Undang- undang tersebut Kondisi Undang- Undang juga masih bagus dan rapih serta dapat dibaca secara jelas.

b. Kritik Internal

Kritik internal merupakan usaha untuk verifikasi kredibilitas sumber Sejarah yang telah dihimpun. Kritik Internal ini mengacu pada kebenaran isi dari sumber-sumber Sejarah yang telah dikumpulkan.

- 1) Hasil Rekapitulasi KPU Pemilu Tahun 1999 oleh Media Akun Resmi KPU. Sumber ini layak untuk di jadikan sumber karena di keluarkan langsung oleh KPU melalui laman internetnya. Hasil Pemilu juga sangat jelas mengenai partai politik yang berpartisipasi dan jumlah pemilih serta jatah kursi dari tiap pemenangnya. Namun, dalam hasil ini ada nomor yang kurang yaitu nomor 21 satu, sehingga memerlukan akses ke media lain untuk melengkapi hal tersebut.
- 2) Hasil Rekapitulasi KPU Pemilu Tahun 2004 dalam akun resmi KPU tidak tercantum dengan jelas mengenai hasil dan perolehan suara dari setiap partai politiknya, namun tercantum di media Badan Pusat Statistik dan disana terlihat jelas mengenai tulisan dan urutannya. Kekurangan dari hasil Pemilu 2004 yang tercantum dalam media Badan Pusat Statistik adalah nomor urut yang hilang atau tidak tercantum yaitu nomor 18, sehingga mengharuskan untuk mencari media lain untuk menyempurnakan hasil Pemilu tersebut.
- 3) Koran “Berita Yudha” Edisi Jum’at, 14 Desember 1984, tentang Hasil-hasil Muktamar Nahdlatul Ulama. Surat kabar ini penulis melihat bahwa surat kabar ini dapat menghasilkan pemahaman, klasifikasi atau definisi yang dapat membantu dalam penelitian penulis dan merupakan sumber yang kredibel/dapat dipercaya. Dalam koran tersebut menjelaskan tentang garis besar hasil dari Muktamar NU di Situbondo 1984.
- 4) Koran “Berita Yudha” Edisi Rabu, 12 Desember 1984, tentang Keluarnya NU dari PPP Didorong Faktor Depolitisasi Dalam

NU. Surat kabar ini penulis melihat bahwa surat kabar ini dapat menghasilkan pemahaman, klasifikasi atau definisi yang dapat membantu dalam penelitian penulis dan merupakan sumber yang kredibel/dapat dipercaya. Dalam koran tersebut menjelaskan mengenai dinamika keluarnya NU dari PPP dan dilengkapi dengan wawancara tokoh-tokoh pada masa tersebut.

- 5) Koran “Berita Yudha” Edisi Senin, 10 Desember 1984, tentang NU Tidak Terikat PPP. Surat kabar ini penulis melihat bahwa surat kabar ini dapat menghasilkan pemahaman, klasifikasi atau definisi yang dapat membantu dalam penelitian penulis dan merupakan sumber yang kredibel/dapat dipercaya. Dalam pembahasan ini terdapat dua halaman koran dan pembahasannya mencakup konflik internal dan eksternal NU.
- 6) Koran “Bali Post” Edisi Jum’at Pon, 4 Desember 1998. Hal 15, tentang PPP sulit raih suara pada pemilu 1999. Dalam koran ini disebutkan tokoh dan pengamat politik pada saat itu yang memberikan penjelasan terkait peristiwa tersebut sehingga keabsahan dari koran ini asli.
- 7) Koran “Bali Post” Edisi Senin Kliwon, 1 Maret 1999, tentang Lama ditindas kini saatnya PKB membalas. Dalam koran tersebut ada tokoh besar yang memberikan penjelasan pada waktu yang berdekatan dengan terbitnya koran tersebut. Dalam koran tersebut juga berisikan stemple pers nasional yang artinya koran tersebut asli diterbitkan pada masa itu.
- 8) Surat Tugas PBNU Tentang Sejarah Pendirian PKB pada Tanggal 22 Juni 1998, sumber ini lolos dalam tahapan intern karena sumbernya layak untuk dijadikan sebagai bukti bahwa PBNU mengeluarkan surat tugas yang Dimana telah tertera dalam surat tersebut terkait dikeluarkannya Dimana dan kapan. Dalam Surat ini juga tertera siapa saja yang ikut dalam rapat

tersebut dan dalam surat tugas ini juga terlampir tanda tangan dari petinggi NU dan cap stemple dari PBNU.

- 9) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975, tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Undang- undang ini penulis melihat bahwa dapat menghasilkan pemahaman, klasifikasi atau definisi yang dapat membantu dalam penelitian penulis dan merupakan sumber yang kredibel/dapat dipercaya. Tertera juga Logo Presiden Republik Indonesia serta disahkan dan di tanda tangan oleh Presiden dan Sekretaris Negara pada masa tersebut.
- 10) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002, tentang Partai Politik. Undang- undang ini penulis melihat bahwa dapat menghasilkan pemahaman, klasifikasi atau definisi yang dapat membantu dalam penelitian penulis dan merupakan sumber yang kredibel/dapat dipercaya. Tertera juga Logo Presiden Republik Indonesia serta disahkan dan di tanda tangan oleh Presiden dan Sekretaris Negara pada masa tersebut.

3. Interpretasi

Tahap ketiga dalam cara penelitian sejarah adalah interpretasi. Dalam tahap ini, sejarawan harus memiliki ketelitian dan sikap netral, terutama dalam membaca fakta sejarah dengan cara yang tidak bias. Proses ini dapat dilakukan dengan memahami karakteristik peradaban atau kondisi umum yang sesungguhnya serta menggunakan pemikiran kritis untuk mencapai kesimpulan atau pemahaman tentang sejarah yang berdasarkan penelitian.³⁶

Dalam melakukan analisis ini, penulis mengadopsi teori identitas sosial yang dikembangkan oleh Henri Tajfel dan John Turner pada tahun 1979 untuk menjelaskan bagaimana individu mengkontruksi identitas diri

³⁶ Abd. Rahman Hamid, *Pengantar Ilmu Sejarah..* h. 49.

mereka berdasarkan keanggotaan dalam sebuah kelompok sosial tertentu. Dalam teori ini, individu tidak hanya melihat dirinya sebagai pribadi yang unik, tetapi juga sebagai bagian dari identitas sosial yang berasal dalam kelompok (NU) yang memiliki kesamaan nilai, keyakinan dan tujuan.³⁷

Tajfel dan Turner membagi proses ini menjadi tiga tahap utama: *social categorization* (kategori sosial), *social identification* (identifikasi sosial), dan *social comparison* (perbandingan sosial). Melalui proses kategorisasi, individu mulai membedakan antara kelompoknya sendiri (ingroup) dan kelompok lain (outgroup). Contohnya, membedakan antara kultural NU dengan kelompok politik yang lainnya. Dalam tahap selanjutnya yaitu identifikasi sosial, individu mulai menginternalisasi nilai-nilai dan simbol kelompoknya sebagai bagian dari identitas mereka. Dalam hal ini, loyalitas politik diukur sampai sejauh mana sebuah kelompok atau partai (PPP atau PKB) mampu mempresentasikan nilai-nilai kultural NU. Terakhir, dalam tahap perbandingan sosial, individu cenderung menilai kelompoknya lebih unggul atau lebih otentik dibandingkan kelompok lain demi memperkuat harga diri kolektif.³⁸

Dalam pengaplikasiannya, teori ini membantu menjelaskan bagaimana afiliasi politik dapat terbentuk berdasarkan identitas sosial dan keagamaan. Bagi kelompok seperti kaum nahdliyin (pengikut atau simpatisan Nahdlatul Ulama), identitas keagamaan tradisional menjadi dasar utama dalam memilih partai politik yang dianggap mewakili nilai-nilai dan perjuangan mereka. Hal ini menjelaskan mengapa afiliasi politik mereka lebih cenderung stabil dalam jangka waktu tertentu, namun juga dapat berubah seiring perubahan persepsi terhadap partai yang dianggap mewakili kelompok mereka.³⁹

³⁷ Kaase, Max Barnes, S, *Political Action Mass Participation in Five Western Democracies*.h. 38–49.

³⁸ Kaase, Max Barnes, S.h. 40–45.

³⁹ Kaase, Max Barnes, S.h. 40–45.

Dapat disimpulkan bahwa adanya delegitimasi PPP yang terjadi pada Pemilu 1999, PPP kehilangan daya tariknya karena citranya yang terasosiasi kuat dengan Orde baru, sehingga tidak lagi dianggap kelompok yang otentik bagi kaum Nahdhiyin. PKB melakukan legitimasi yang dimana PKB menjadi daya tarik warga Nahdhiyin karena didukung tokoh sentral seperti Gus Dur dan PKB juga dianggap sebagai kendaraan politik yang paling sesuai dengan warga NU. Adapun tahap fragmentasi yaitu pada Pemilu 2004, walaupun PKB mengalami konflik internal sehingga warga Nahdhiyin menyebar dan tidak memilih kembali ke PPP, menunjukkan bahwa PPP gagal dalam memulihkan identitas sebagai wadah kaum Nahdhiyin.⁴⁰

Dalam menggunakan teori ini, penulis memposisikan dinamika politik bukan sekadar simbol perebutan kekuasaan, melainkan sebagai bentuk kontestasi atau ajang kontestasi identitas yang di mana warga Nahdhiyin mencari wadah yang paling otentik mencerminkan jati diri keagamaan dan sosial mereka..⁴¹

4. Historiografi

Tahapan terakhir setelah menjalani proses pengumpulan data, pengujian data, dan interpretasi data adalah historiografi atau penulisan sejarah. Aspek waktu memiliki peranan penting dalam penulisan sejarah, melalui tahapan ini penataan pokok masalah penelitian dilakukan, serta mempermudah pengorganisasian penelitian agar lebih terstruktur.⁴²

Dalam langkah ini penulis menyusun rencana penelitian sebagai berikut:

Bab I, Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang penulisan, rumusan masalah yang bertujuan menjawab tujuan penelitian sejarah, rencana penulis mengenai ruang lingkup, lokasi dan waktu penelitian, serta membahas metode penelitian sejarah (heuristik, kritik, interpretasi,

⁴⁰ Ridwan, *Nu & Bangsa 1914 - 2010: Pergulatan Politik & Kekuasaan*.h. 140–145.

⁴¹ Setiawan, *Nasionalisme NU*.h. 103.

⁴² Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*.h. 60–65.

dan historiografi) yang akan digunakan penulis sebagai langkah-langkah dalam melakukan penelitian.

Bab II, Pada bab ini penulis akan memulai dengan sejarah Pemilu terakhir dari partai NU yang berlangsung pada Pemilu 1971, penggabungan partai, Muktamar NU di Situbondo yang membawa NU kembali ke Khittah 1926, dan diakhiri dengan berakhirnya masa Orde Baru.

Bab III, Pada bagian ini penulis akan membahas dinamika masyarakat Nahdliyin dalam Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 yang menjadi arena persaingan dua partai, yaitu PPP dan PKB, sebagai saluran untuk aspirasi politik warga Nahdliyin.

Bab IV, Ini adalah tahap penutup dari pembahasan laporan penulis. Di sini, penulis akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian, serta mencantumkan sumber yang digunakan dan lampiran yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian.

